

Judul : Keikutsertaan BoP Gaza, Komisi I anggap kontribusi global
Tanggal : Jumat, 30 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Keikutsertaan BoP Gaza Komisi I Anggap Kontribusi Global

FOTO TEDYRM



Utut Adianto

KETUA Komisi I DPR Utut Adianto mengungkapkan, iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,8 triliun untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau *Board of Peace* (BoP) terkait Gaza tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, anggaran negara diketok jauh sebelum wacana itu mencuat.

Dia menjelaskan, secara prosedural tidak mungkin muncul pembiayaan baru tanpa melalui mekanisme anggaran yang sah. Saat anggaran pertahanan 2026 sebesar Rp 187,1 triliun diketok pada 23 September 2025, tidak ada slot untuk agenda itu. Kendati demikian, tak tertutup peluang sumber pembiayaan lain di luar APBN.

"Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Opsi itu masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah bersama DPR," jelas Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Politikus senior PDIP itu memandang, jika pembiayaan berasal dari sumber yang sah dan transparan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP justru dapat dimaknai sebagai bentuk kontribusi global yang membanggakan. Pasalnya, posisi Indonesia di forum internasional memiliki nilai strategis tersendiri.

"Nanti kalau memang ada

sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional," tegasnya.

Dia menekankan, keterlibatan Indonesia dalam mekanisme internasional semacam BoP berpotensi menghadirkan manfaat tidak langsung bagi negara. Dinamika global di mana satu sama lain saling memengaruhi, membuka ruang keuntungan strategis bagi Pemerintah dan masyarakat. "Misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan transfer of technology, dan yang lain-lain," katanya.

Utut menegaskan, partisipasi Indonesia dalam BoP terkait Gaza merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Selain itu, kehadiran Indonesia difokuskan pada misi perdamaian, bukan terlibat langsung dalam pertempuran.

Menurutnya, prinsip itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, keikutsertaan Indonesia harus dipahami dalam kerangka politik luar negeri yang konsisten dan berlandaskan konstitusi.

Poin terpenting dari partisipasi Indonesia, sambungnya, adalah menjaga perdamaian di wilayah konflik, khususnya Gaza, yang hingga kini masih dilanda krisis kemanusiaan berkepanjangan. Fokus utama misi itu adalah stabilisasi dan perlindungan warga sipil, bukan bertempur.

Dia juga menepis kekhawatiran terkait kepemimpinan BoP yang disebut akan dipimpin jenderal dari AS. Indonesia tetap berpegang pada mandat perdamaian tanpa terlibat dalam aksi tempur. "Kita berharap akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita, tapi tidak untuk ikut bertempur. Tadi kita underline, kita tidak bertempur," tegasnya. ■ PYB